



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



Makalah Kebijakan No. 33
Perjanjian Kemitraan Ekonomi
Komprehensif Indonesia-Australia:
Membangun Poros Kekuatan

oleh Arianto Patunru, Andree Surianta, dan Pingkan Audrine

www.cips-indonesia.org

Makalah Kebijakan No. 33
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia:
Membangun Poros Kekuatan

Penulis:

Arianto Patunru, Andree Surianta, dan Pingkan Audrine

Ucapan Terima Kasih:

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Noor Halimah atas bantuannya dalam publikasi penelitian ini.

Jakarta, Indonesia

Februari, 2021

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	6
IA-CEPA: Gambaran Singkat.....	8
Komponen Utama dalam Perjanjian IA-CEPA.....	8
Ketentuan Perdagangan Barang dan Jasa.....	10
Ketentuan Investasi.....	10
Program Kerja Sama Ekonomi.....	11
Tren dan Tantangan yang Muncul.....	13
Hubungan Ekonomi Indonesia-Australia.....	13
Ekspor Indonesia ke Australia.....	14
Impor Indonesia dari Australia.....	15
Hubungan PMA Australia dan Indonesia.....	16
Dinamika Perdagangan dan Investasi Internasional.....	17
Munculnya Perjanjian Perdagangan.....	17
Rantai Nilai Global.....	18
Perang Dagang AS-RRT dan Covid-19.....	19
Memaksimalkan Memanfaat IA-CEPA.....	20
Poros Kekuatan Manufaktur Makanan dan Minuman	
Indonesia dan Australia: Tantangan dan Peluang.....	20
Membangun Poros Kekuatan melalui Kemitraan.....	23
Berinvestasi di Poros Kekuatan Pendidikan Tinggi	
Indonesia-Australia.....	26
Pelajaran dari Seberang Selat.....	27
Poros Kekuatan IA-CEPA: Beberapa Hambatan Domestik.....	30
Rekomendasi Kebijakan.....	31
Referensi.....	33

Daftar Tabel

Tabel 1. Struktur IA-CEPA	9
Tabel 2. Destinasi Utama Ekspor Barang Indonesia 2018.....	14
Tabel 3. Negara Asal Utama Impor Barang Indonesia 2018	15
Tabel 4. Industri Olahan Makanan dan Minuman di Indonesia	22
Tabel 5. Hasil IA-CEPA untuk Gandum dan Daging Merah.....	25

Daftar Gambar

Gambar 1. Tingkat Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman, 2015-2019 (persen)	21
Gambar 2. Malaysia sebagai Pusat Pendidikan Regional	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Januari 2020 parlemen Indonesia meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) yang mulai berlaku pada Juli 2020. Cikal bakal perjanjian ini adalah pada tahun 2005 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia John Howard, yang kala itu tengah menjabat, setuju untuk meningkatkan hubungan dagang antara kedua negara. Negosiasi dimulai pada 2010, dan setelah hampir satu dekade, kedua pemerintah menandatangani perjanjian pada Maret 2019.

IA-CEPA muncul di saat yang tepat. Selagi kebanyakan negara tengah dalam masa pemulihan dari Krisis Finansial Global 2007-2008, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terlibat dalam perang dagang. Eskalasi tarif dan hambatan perdagangan lain yang diterapkan oleh dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar tersebut akhirnya memaksa negara-negara lain untuk menyesuaikan praktik perdagangan mereka. Kemudian datang pandemi Covid-19 yang mengganggu perdagangan dunia dan menyebabkan hampir semua negara mengambil langkah pembatasan untuk mencegah penyebaran infeksi virus. Perdagangan internasional diperkirakan jatuh sebesar 30% dan Penanaman Modal Asing (PMA) juga turun hingga sebesar 40% di tahun 2020.

Seperti negara lainnya, Indonesia dan Australia juga mengalami resesi ekonomi dengan perkiraan nilai pertumbuhan tahun 2020 sebesar -1,5% dan -4%. Keduanya bergantung pada belanja negara untuk menjaga ekonomi tetap berjalan selagi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Setelah pandemi berakhir, Indonesia dan Australia akan fokus membangun kembali ekonomi mereka. IA-CEPA dapat memfasilitasi upaya ini.

Perekonomian kedua negara sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam ke RRT, sehingga perdagangan bilateral dan volume investasi selalu rendah meskipun kondisi geografis berdekatan. Perdagangan global telah berkembang pesat, didorong oleh rantai produksi yang secara global juga meningkat. Negara-negara berpartisipasi dalam produksi internasional ini disebut-sebut sebagai mengambil bagian dalam rantai nilai global. Pandemi mungkin memperlambat langkah menuju produksi global, namun tidak akan menghentikan atau menggagalkannya. Dibandingkan dengan banyak negara, keterlibatan Indonesia dan Australia dalam rantai nilai global masih rendah. Meningkatkan keterlibatan dalam rantai nilai global dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada RRT.

Oleh karena itu, kami melihat ada peluang untuk menggunakan IA-CEPA dengan dua cara. Pertama, kedua negara mengambil peluang keuntungan dari perjanjian ini untuk fokus pada hal yang sifatnya saling melengkapi atau komplementer. Mengingat di tingkat agregat ekspor kedua negara sama-sama bergantung pada sumber daya alam, maka sifat komplementer ini cenderung dapat ditemukan pada tingkatan produksi yang berbeda. Misalnya, Australia mengekspor gandum ke Indonesia sebagai bahan industri makanan Indonesia yang kemudian diekspor lagi ke pasar yang lain.

Maka dari itu, Indonesia dan Australia sebaiknya memprioritaskan kerja sama dengan model poros kekuatan (*Powerhouse*) atau produksi bersama (*Joint Production*), yaitu dengan menggunakan bahan mentah dari Australia untuk komoditas ekspor manufaktur Indonesia atau sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menargetkan pasar regional dan dunia alih-alih berfokus hanya pada arus perdagangan dan investasi dua arah.

Kedua, baik Indonesia maupun Australia sebaiknya mengambil keuntungan dari luasnya cakupan perjanjian ini guna memastikan bahwa kerja sama tidak terbatas hanya pada perdagangan dan investasi, tetapi juga untuk mendorong reformasi domestik. Indonesia secara khusus dapat menggunakan IA-CEPA untuk memfasilitasi reformasi yang tengah berjalan setelah pengesahan UU Cipta Kerja 2020. Reformasi tersebut harus termasuk memperbaiki iklim regulasi, terutama di sektor manufaktur makanan dan minuman serta pendidikan tinggi.

Dalam laporan ini kami menyoroti isu-isu penting serta tantangan dalam IA-CEPA dengan menggunakan kasus-kasus yang ada pada dua area utama perjanjian ini: perdagangan di sektor manufaktur makanan dan minuman serta investasi di sektor pendidikan tinggi. Berdasarkan analisa kami, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan:

1. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebaiknya tidak mengimplementasi strategi substitusi impor untuk industri manufaktur makanan dan minuman. Strategi substitusi impor di sektor ini akan menghambat perkembangan 'poros kekuatan' industri makanan dan minuman Indonesia-Australia untuk terlibat dalam rantai nilai global.
2. Kementerian Pertanian (Kementan) sebaiknya merevisi Pasal 7 (1) Permentan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan menghilangkan "kebijakan rasio ternak 1:5", yang menghambat penggunaan penuh kuota yang telah ditingkatkan dalam IA-CEPA, dan akan mengganggu pengembangan sebuah 'poros kekuatan' di sektor daging olahan.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebaiknya memiliki strategi global untuk pendidikan tinggi dengan bekerja sama dengan Departemen Imigrasi guna menyederhanakan prosedur aplikasi pelajar internasional. Terakhir, pemerintah Indonesia sebaiknya mengintegrasikan Izin Belajar, Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Tinggal Terbatas (E-ITAS) menjadi sebuah visa pelajar tunggal dan juga menghapus persyaratan izin keluar.
4. Pemerintah Indonesia dan universitas di Australia seharusnya menggunakan IA-CEPA sebagai proyek percobaan di mana kedua belah pihak bisa mendapatkan pelajaran tentang investasi internasional di sektor pendidikan tinggi. Tahap pembukaan awal dengan hanya satu negara dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi hambatan investasi yang tidak terduga sekaligus juga meminimalkan risiko kegagalan membuka sektor ini lebih lanjut bagi investor asing.

IA-CEPA: GAMBARAN SINGKAT

Pada 4 April 2005, saat kunjungannya ke Australia, Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutannya dalam forum dialog bisnis Indonesia-Australia dan menekankan potensi manfaat yang akan berkembang dari ekspansi hubungan bisnis antara kedua negara, yaitu dengan perdagangan jasa sebagai area prioritas untuk pertumbuhan lebih lanjut dan sektor kesehatan dan pendidikan di lini terdepan. Ia juga mendorong untuk menjaga pasar yang terbuka, meningkatkan pariwisata, mengevaluasi kembali hambatan non-tarif, dan menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan bisnis (Parlemen Australia, 2005). Dalam upaya mencapai hubungan ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Australia, Presiden Yudhoyono dan PM John Howard setuju untuk membuat kemitraan ekonomi komprehensif (Parlemen Australia, 2005).

Studi kelayakan bersama untuk mengevaluasi keuntungan sebuah perjanjian bilateral perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) kemudian dilakukan pada tahun 2007. Dibutuhkan hampir tiga tahun sampai studi ini akhirnya selesai (Department of Foreign and Trade of Australia [DFAT] dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag], 2009). Akhirnya, pada 2 November 2010, pemimpin Indonesia dan Australia setuju untuk memulai negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Setelah hampir satu dekade, pada 4 Maret 2019, kedua negara yang diwakilkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham, akhirnya menandatangani perjanjian tersebut.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Januari 2020 mengesahkan perjanjian tersebut, menandai sebuah sejarah baru untuk hubungan bilateral Indonesia dengan Australia (Parlemen Indonesia, 2020). Setelah itu, perjanjian ini resmi dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Kemendag, 2020a). Parlemen Australia mengesahkan perjanjian ini pada 26 November 2019 (Parlemen Australia, 2019). Perjanjian ini akhirnya mulai berlaku pada 5 Juli 2020 (Sekretariat Kabinet, 2020).

Komponen Utama dalam Perjanjian IA-CEPA

IA-CEPA membuat sebuah kerangka kerja untuk Indonesia dan Australia agar dapat mencapai potensi penuh dari kemitraan ekonomi bilateral ini, dan untuk membangun kerjasama yang dimulai dari FTA ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), serta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang baru ditandatangani (ASEAN, 2020). IA-CEPA juga memperluas pengurangan tarif yang dicapai melalui AANZFTA (Neo, 2020). Dengan 21 bab mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, perdagangan melalui sistem elektronik, dan isu perdagangan khusus (Tabel 1), perjanjian bilateral ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi di semua tingkat—badan usaha, komunitas, dan individu (DFAT, 2020b). Akan tetapi, pemanfaatannya yang paling signifikan baru akan tercapai dengan mengadopsi sebuah pola pikir yang bertumpu pada rantai nilai global, di mana perdagangan dan investasi

Dengan 21 bab mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, perdagangan melalui sistem elektronik, dan isu perdagangan khusus (Tabel 1), perjanjian bilateral ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi di semua tingkat—badan usaha, komunitas, dan individu.

antara kedua mitra ini bertujuan untuk membuat basis produksi bersama agar dapat memasok pasar-pasar lain.

Tabel 1.
Struktur IA-CEPA

Komponen	Pokok Persoalan	Dokumen Terkait
Bab 1	Ketentuan Pendahuluan dan Definisi Umum	
Bab 2	Perdagangan Barang	Lampiran 2-A: Jadwal Komitmen Tarif Apendiks 2-A.1 Tariff Rate Quotas
Bab 3	Tindakan Non Tarif	
Bab 4	Ketentuan Asal Barang	Lampiran 4-A: Prosedur untuk Menerbitkan Surat Keterangan Asal Apendiks 4-A.1 Daftar Persyaratan Data Lampiran 4-B: Prosedur untuk Membuat Deklarasi Asal
Bab 5	Prosedur Kepabeanan	
Bab 6	Fasilitasi Perdagangan	
Bab 7	Tindakan Sanitary dan Phytosanitary	
Bab 8	Hambatan Teknis Perdagangan	
Bab 9	Perdagangan Jasa	Lampiran 9-A: Jasa Profesional
Bab10	Jasa Keuangan	Lampiran 10-A: Otoritas yang Bertanggungjawab untuk Jasa Keuangan
Bab 11	Telekomunikasi	
Bab 12	Perpindahan Orang Perseorangan	Lampiran 12-A: Jadwal Komitmen Australia untuk Perpindahan Orang Perseorangan Lampiran 12-A: Jadwal Komitmen Indonesia untuk Perpindahan Orang Perseorangan
Bab 13	Perdagangan Elektronik	
Bab 14	Penanaman Modal	Lampiran 14-A: Kode Etik Arbitrator Lampiran 14-B: Pengambilalihan dan Kompensasi Lampiran 14-C: Kebijakan Penanaman Modal Asing Lampiran 14-D: Lampiran pada Utang Publik
Bab 15	Kerja Sama Ekonomi	
Bab 16	Persaingan Usaha	
Bab 17	Ketentuan Umum dan Pengecualian	
Bab 18	Ketentuan Kelembagaan	
Bab 19	Transparansi	
Bab 20	Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa	Lampiran 20-A: Aturan Prosedur Lampiran 20-B: Kode Etik
Bab 21	Ketentuan Akhir	

Sumber: DFAT (2020b)

Ketentuan Perdagangan Barang dan Jasa

IA-CEPA memiliki visi menciptakan sebuah model 'poros kekuatan' ekonomi, di mana Indonesia dan Australia menyatukan kekuatan untuk mengakses rantai nilai global (Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne-Victoria, Australia, 2020). Model ini mengupayakan identifikasi industri yang saling melengkapi atau komplementer di Australia dan Indonesia, kemudian

“Sementara perjanjian perdagangan bebas umumnya bertujuan untuk meningkatkan ekspor konsumsi akhir barang di antara pihak yang bermitra, maka konsep poros kekuatan ini mencoba menciptakan rantai nilai yang meliputi kedua negara yang memasok negara lain di luar perjanjian.”

menguatkan hubungannya guna mengakses pasar di negara-negara lain. Jika perjanjian perdagangan bebas biasanya bertujuan untuk meningkatkan ekspor barang konsumsi di antara pihak yang bermitra, maka konsep poros kekuatan ini mencoba menciptakan rantai nilai yang meliputi kedua negara yang memasok negara lain di luar perjanjian. IA-CEPA khususnya akan sangat cocok untuk menggunakan konsep ini di sektor manufaktur makanan dan minuman, karena dapat mendongkrak kapasitas produksi makanan dan minuman utama di Indonesia dengan memanfaatkan kapasitas pertanian Australia.

Ketentuan perdagangan dalam perjanjian ini dijabarkan dalam Bab 2 (Perdagangan Barang) dan Bab 9 (Perdagangan Jasa). Bab 2 terdiri dari 15 bagian, setiap bagian terdiri dari beragam spesifikasi teknis untuk standarisasi kegiatan perdagangan, termasuk pengurangan atau eliminasi bea cukai, skema *tariff rate quota* (TRQ), akselerasi atau peningkatan komitmen tarif, serta dialog instrumen perlindungan perdagangan. Catatan teknis tentang daftar komitmen tarif untuk Indonesia dan Australia dijabarkan dalam Lampiran 2-A. Dalam hal hambatan non-tarif, IA-CEPA memberikan aturan spesifik untuk skema TRQ di delapan sektor, yaitu (1) sapi potong hidup; (2) kentang; (3) wortel; (4) jeruk; (5) jeruk mandarin, clementine, wilking, dan jeruk hibrida sejenis lainnya; (6) lemon dan jeruk nipis; (7) pakan biji-bijian (seperti gandum dan meslin, barli, dan sorgum); dan (8) baja canai panas atau gulungan baja lembaran dingin.

Bab 9, tentang perdagangan jasa, terdiri dari 14 bagian dan satu lampiran yang mencakup standar Perjanjian Umum Perdagangan Jasa atau *General Agreement on Trade in Services* (GATS), termasuk perlakuan domestik dan perlakuan setara atau *most-favored-nation* (MFN), akses pasar, kehadiran secara lokal, peraturan penyesuaian, dan penetapan Komite Perdagangan Jasa. Lampiran dari bab ini fokus pada mencapai pengenalan umum layanan profesional yang akan dikelola oleh Kelompok Kerja Layanan Profesional.

Ketentuan Investasi

Ketentuan investasi dalam IA-CEPA dijabarkan di Bab 14. Bab ini terdiri dari dua bagian dan empat lampiran yang menjelaskan tentang perlakuan dan perlindungan investor. Dengan investasi yang mayoritas berfokus pada sektor layanan, Bagian A dari bab ini kembali mengikuti standar GATS, yakni perlakuan yang sama dengan investor lokal (perlakuan domestik), perlakuan setara dengan negara-negara lain (MFN), dan tanpa pembatasan operasi (larangan persyaratan kinerja) dan penunjukkan pimpinan eksekutif senior (manajemen senior dan dewan direksi). Bagian B mencakup mekanisme Penyelesaian Sengketa antara investor dengan pemerintah atau Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yang menjabarkan prosedur arbitrase antara investor dan negara tuan rumah. Bab ini ditinjau oleh Komite Investasi yang bertemu setiap dua tahun sekali.

Meskipun ketentuan yang disebutkan di atas mengurangi praktik diskriminatif terhadap perusahaan asing—sesuatu yang sangat khas Indonesia—bagian 14.14 tetap mengizinkan kedua negara untuk menjabarkan tindakan pengecualian yang dapat dianggap sebagai 'hak untuk membatasi'. Bahkan ketentuan ISDS dan pelarangan pengambilalihan mengandung pengecualian yang membuat perjanjian ini kurang kuat jika dibandingkan dengan Perjanjian Investasi Bilateral yang dahulu pernah ada antara Indonesia dan Australia (Thresher, 2020).

Peraturan penyesuaian ini tertera dalam Lampiran I dan II. Ternyata, kedua negara sejatinya mempertahankan pembatasan investasi yang sudah ada. Termasuk di dalamnya ambang batas tinjauan PMA untuk investasi pertanian di Australia dan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menjelaskan batas kepemilikan pemegang saham asing di berbagai sektor usaha di Indonesia. UU Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang baru-baru ini disahkan kemungkinan menggantikan DNI dengan Daftar Prioritas Investasi. Meskipun daftar baru ini masih dibuat, tergantung dari isinya, investor Australia mungkin lebih baik mengikuti jalur investasi umum ketimbang menggunakan ketentuan investasi dalam IA-CEPA.

Program Kerja Sama Ekonomi

Fitur unik IA-CEPA adalah penyertaan Program Kerja Sama Ekonomi atau *Economic Cooperation Program* (ECP), yang mengaitkan program bantuan atau *official development assistance* (ODA/aid) dengan perjanjian perdagangan bebas ini. ECP bertujuan untuk meningkatkan potensi kesuksesan pelaksanaan IA-CEPA dengan mendukung reformasi regulasi melalui bantuan teknis, memfasilitasi hubungan antarindustri, dan mengembangkan standar umum dan kerangka kerja keahlian. ECP akan berlokasi di Jakarta dengan anggaran awal US\$ 40 juta dan akan berlangsung selama lima tahun. Tadinya program ini akan dimulai tahun 2020, tetapi pandemi membuatnya harus ditunda ke tahun 2021.

Kegiatan ECP akan diawasi oleh Komite Kerja Sama Ekonomi atau *Economic Cooperation Committee* (ECC), komite gabungan antara pemerintah Indonesia dan Australia. Operasional harian akan dijalankan oleh sebuah Pusat Kolaborasi (*Collaborative Hub*) yang melapor kepada ECC dan juga membantu dalam merancang dan melaksanakan program. Pusat Kolaborasi ini juga akan mendorong ODA Australia yang sudah ada di Indonesia seperti PROSPERA, PRISMA, *Australia Awards*, PAIR, *Australia-Indonesia Centre*, dan *Austrade*. Di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah diajukan sebagai perwakilan Indonesia di ECC. Bappenas akan ditugaskan untuk mengawasi dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi pemerintah Indonesia lainnya. ECP akan menjaga kolaborasi dengan pihak swasta melalui dialog bisnis, lokakarya, dan seminar.

ECP bertujuan untuk mencapai tiga hal ketika nanti selesai di tahun 2025: memperluas akses pasar, integrasi pasar yang lebih baik, dan peningkatan keahlian di pasar tenaga kerja Indonesia. ECP akan fokus menggerakkan kegiatan dalam upaya mencapai tiga tujuan tersebut di tiga lintas sektor ekonomi: pangan pertanian, manufaktur canggih, dan layanan. Setiap dari sektor tersebut akan memiliki kegiatan tahunan sendiri di bawah Kemitraan Inovasi Pangan Pertanian atau *Agrifood Innovation Partnerships*, Pemberdayaan Manufaktur Canggih atau *Powering Advanced Manufacturing*, dan Investasi Bersama untuk Keahlian dan Pelatihan atau *Co-Investing in Skills and Training*.

ECP akan fokus menggerakkan kegiatan dalam upaya mencapai tiga tujuan tersebut di tiga lintas sektor ekonomi: pangan pertanian, manufaktur canggih, dan layanan.

Kemitraan Inovasi Pangan Pertanian senilai AUS\$ 7,5 juta (sekitar US\$ 5,6 juta) ini akan dimulai dengan kegiatan '*Grains Partnership*' yang akan mendukung hubungan industri gandum untuk pangan dan pakan. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan gandum dan produk olahan makanan antara Australia dan Indonesia, serta untuk meningkatkan dukungan investasi di sektor olahan makanan di Indonesia sebagai industri dengan pertambahan nilai. Indonesia adalah pengeksport kedua terbesar di dunia untuk mie instan pada tahun 2018, predikat yang didukung oleh industri tepung gandum yang kuat dan merupakan konsumen utama gandum asal Australia. Salah satu tujuan kemitraan ini adalah untuk meneruskan model rantai nilai global yang sukses ke produk berbasis tepung lainnya yang ada di Indonesia, seperti misalnya produk olahan roti dan kue. Selain itu, kemungkinan ada juga minat akan model rantai nilai global makanan halal.

Manufaktur yang canggih dan kegiatan jasa juga menjadikan industri olahan makanan sebagai target sekundernya. Meskipun dana sebesar AUS\$ 5 juta (US\$ 3,7 juta) dialokasikan untuk kegiatan Pemberdayaan Manufaktur Canggih pada mulanya akan berfokus pada pengembangan baterai elektronik dan masukan daya kendaraan elektrik, namun ada juga rencana untuk memperluasnya hingga ke industri makanan olahan. Dana sebesar AUS\$ 8,9 juta (US\$ 6,7 juta) dialokasikan untuk kegiatan Investasi Bersama untuk Keahlian dan Pelatihan bertujuan untuk membangun kemitraan yang lebih signifikan antara penyedia pelatihan dan pendidikan kejuruan teknis di antara masyarakat Indonesia dan Australia. Salah satu fokus areanya adalah pertanian. Kegiatan di sektor ini secara khusus menyebutkan program pelatihan untuk penggilingan tepung Indonesia yang tercakup di dalam *Grain Partnerships*. Beragam fokus program mengilustrasikan bahwa sifat saling melengkapi antara usaha pertanian Australia dan industri manufaktur makanan dan minuman Indonesia membuat area ini menjadi kandidat yang baik untuk pelaksanaan pendekatan poros kekuatan.

TREN DAN TANTANGAN YANG MUNCUL

Efektivitas pelaksanaan IA-CEPA akan dipengaruhi oleh tren dan tantangan eksternal ekonomi terhadap perjanjian ini. Hal ini termasuk juga hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Australia dan tren perdagangan internasional, termasuk menjamurnya perjanjian perdagangan bebas, jaringan produksi yang semakin mendunia, dan guncangan global yang disebabkan oleh perang dagang AS-RRT serta pandemi Covid-19. Kami membahas singkat setiap tren dan tantangan ini di bagian berikutnya.

Hubungan Ekonomi Indonesia-Australia

Tahun 2019 menandai 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Kedua negara bertetangga ini telah berkomitmen dengan sumber daya diplomatik yang signifikan untuk memperkuat hubungan mereka. Kedutaan Australia di Indonesia adalah misi diplomatik luar negeri terbesar negara tersebut, mempekerjakan lebih dari 500 staf, termasuk 150 diplomat Australia (Wibawa, 2020). Selain itu, terdapat juga tiga konsulat Australia di kota lain selain Jakarta: Bali (Konsulat Jenderal Australia di Bali, 2020), Makassar (Konsulat Jenderal Australia di Makassar, 2020) dan Surabaya (Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, 2020). Demikian juga Indonesia dengan kedutaan besar di Canberra dan kantor konsulat di kota-kota besar Australia, seperti Sydney, Melbourne, Perth (SGS Economics and Planning Pty Ltd., 2018), dan Darwin (Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, 2020).

Akan tetapi, ikatan erat diplomatik ini tidak terlihat dalam hal hubungan ekonomi. Arus perdagangan dan investasi antara kedua negara terbilang rendah. Total perdagangan barang dan jasa dua arah antar kedua negara bernilai AUS\$ 17,8 miliar atau sekitar US\$ 12,4 miliar di tahun 2018-2019.¹ Bandingkan dengan perdagangan Australia-RRT yang bernilai AUS\$ 252 miliar atau US\$ 175 miliar pada tahun 2019 (DFAT, n.d.). Perdagangan antara Indonesia dan RRT bernilai US\$ 72,6 miliar pada tahun 2018 (Pinandita, 2019). Perdagangan Indonesia-Australia juga menurun—pertumbuhan ekspor dari Indonesia ke Australia antara 2011 dan 2015 adalah -7,9% per tahun, sementara impor sebesar -0,8% (Kemendag, 2020b).

Volume perdagangan yang rendah antara Australia dan Indonesia berlawanan dengan model gravitasi perdagangan internasional yang memprediksikan aliran perdagangan akan lebih tinggi dengan adanya kedekatan geografis (Chaney, 2011). Hal ini mungkin disebabkan karena Indonesia dan Australia memiliki komoditas ekspor yang mirip. Kedua negara bergantung pada ekspor sumber daya alam ke RRT (DFAT, 2020c; Badan Pusat Statistik, 2019). Untuk mengoptimalkan area potensial kerja sama ekonomi, penting untuk mengidentifikasi dan menggali sektor-sektor yang bisa saling melengkapi di antara kedua negara.

Volume perdagangan yang rendah antara Australia dan Indonesia berlawanan dengan model gravitasi perdagangan internasional yang memprediksikan aliran perdagangan akan lebih tinggi dengan adanya kedekatan geografis.

¹ Berdasarkan Nilai Tukar BI pada Desember 2019, US\$ 1 setara dengan Rp13.901 dan AUS\$ 1 setara dengan Rp9.739. Diambil dari <https://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>

Ekspor Indonesia ke Australia

Pada 2018, tujuan ekspor Indonesia kebanyakan ke RRT, Jepang, dan Amerika Serikat. Australia ada di peringkat ke-13 untuk tujuan ekspor Indonesia (lihat Tabel 2). Peringkat itu juga sama pada tahun 2017.

Ekspor barang Indonesia ke seluruh dunia didominasi oleh komoditas sumber daya alam, terutama minyak sawit, batu bara, dan migas, yang mencakup 30% dari total barang yang diekspor. Ekspor Indonesia ke Australia pun serupa—didominasi oleh minyak mentah (US\$ 724 juta pada tahun 2018), produk hasil migas (US\$ 248 juta), dan kayu yang sudah dibentuk (US\$ 144 juta) (Observatory of Economic Complexity, 2020). Indonesia juga mengekspor jasa, terutama pariwisata yang bernilai Rp35 triliun atau US\$ 2,4 juta pada 2018-2019 (Kedutaan Australia di Jakarta, 2019).

Tabel 2.
Destinasi Utama Ekspor Barang Indonesia 2018

No.	Negara	Nilai (US\$)	Pangsa Pasar (%)
1	Republik Rakyat Tiongkok	27.126.932.415	15,05
2	Jepang	19.479.892.015	10,81
3	AS	18.471.771.383	10,25
4	India	13.725.675.911	7,62
5	Singapura	12.991.592.744	7,21
6	Korea	9.532.500.322	5,29
7	Malaysia	9.436.721.366	5,24
8	Filipina	6.825.460.227	3,79
9	Thailand	6.818.948.867	3,78
10	Negara Asia lainnya	4.700.894.117	2,61
11	Vietnam	4.583.936.595	2,54
12	Belanda	3.898.165.830	2,16
13	Australia	2.800.076.351	1,55
	DUNIA	180.215.034.325	

Sumber: CEIC Database

Impor Indonesia dari Australia

RRT adalah sumber utama impor barang bagi Indonesia di tahun 2018, diikuti dengan Singapura dan Jepang. Berlawanan dengan peringkatnya yang rendah sebagai tujuan ekspor Indonesia, Australia berada pada peringkat ke-8 sebagai pengimpor seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. Lagi-lagi, serupa dengan peringkat di tahun 2017.

Sekitar 90% impor Indonesia adalah bahan mentah dan bahan baku utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi domestik sangat bergantung pada impor. Dari Australia, Indonesia mayoritas mengimpor minyak mentah, briket batu bara, dan gandum, yang bernilai US\$ 616 juta, US\$ 590 juta, dan US\$ 547 juta di tahun 2018.

Impor jasa pada 2018 termasuk sebagian besar dari transportasi, perjalanan, dan pariwisata. Total impor jasa bernilai US\$ 1.23 miliar, di mana sebesar US\$ 1.04 miliar dalam bentuk perjalanan, diikuti oleh transportasi (US\$ 111 juta), dan usaha jasa lainnya (US\$ 55.3 juta) (Observatory of Economic Complexity, 2019).

Tabel 3.
Negara Asal Utama Impor Barang Indonesia 2018

No.	Negara	Nilai (US\$)	Pangsa Pasar (%)
1	Republik Rakyat Tiongkok	45.537.814.908	24,13
2	Singapura	21.439.514.466	11,36
3	Jepang	17.976.711.408	9,53
4	Thailand	10.952.798.159	5,80
5	AS	10.212.388.449	5,41
6	Korea	9.088.875.758	4,82
7	Malaysia	8.602.839.083	4,56
8	Australia	5.825.541.411	3,09
9	India	5.016.912.125	2,66
10	Arab Saudi	4.910.728.137	2,60
	DUNIA	188.711.171.618	

Sumber: Database CEIC

Hubungan PMA Australia dan Indonesia

Seperti halnya perdagangan, investasi yang mengalir di antara kedua negara tergolong rendah. Pada 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mencatat investasi Australia mencapai hampir US\$ 350 juta (AUS\$ 500 juta) di semua sektor, kecuali industri minyak dan gas bumi serta sektor layanan jasa keuangan (Jayani, 2020). Nilai ini setara dengan sepertiga investasi AS di Indonesia dan dua puluh kali lebih kecil daripada investasi RRT dan Hongkong digabungkan. Sementara itu nilai investasi Indonesia di Australia pun tergolong sangat rendah, yaitu sejumlah 0,002% dari total jumlah penanaman modal asing di Australia pada tahun 2019 (Australian Bureau of Statistics, 2020).²

Kemiripan antara investasi Australia di Indonesia dengan kegiatan perdagangannya menggambarkan bahwa perdagangan seringkali berfungsi sebagai pengenalan untuk PMA, terutama dalam konteks rantai nilai global.

Menurut data BPKM, hampir setengah dari investasi Australia di Indonesia sejak 2015 ada di sektor pertambangan. Industri metal non-mesin kemudian mengikuti di angka 10%, serta perhotelan dan pertanian dengan nilai seimbang di angka 8%. Kemiripan antara investasi Australia di Indonesia dengan kegiatan perdagangannya menggambarkan bahwa perdagangan seringkali berfungsi sebagai pengenalan untuk PMA, terutama dalam konteks rantai nilai global. Jika perusahaan merasa bahwa mengimpor dan mengekspor material, produk akhir, dan barang setengah jadi dari/ke sebuah negara mudah, maka mereka cenderung akan memilih lokasi tersebut sebagai bagian dari rantai pasok mereka. Memahami hubungan ini sangat penting untuk model ekonomi poros kekuatan.

Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan IA-CEPA mendorong investasi. Kemendag mengklaim bahwa IA-CEPA meningkatkan iklim investasi di sektor layanan, di mana Australia sudah menunjukkan minatnya, yaitu: pendidikan dan pelatihan kejuruan, pendidikan tinggi, pariwisata, konstruksi, pertambangan, energi, rumah sakit, pengelolaan air limbah, perawatan lansia, transportasi, telekomunikasi, dan layanan profesional (Direktorat Negosiasi Bilateral, 2020). DFAT juga mengklaim bahwa IA-CEPA merupakan wujud komitmen paling kuat dari pemerintah Indonesia untuk investasi asing (Australia) jika dibandingkan dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya (DFAT, 2019a). Akan tetapi, analisa terhadap perjanjian ini menunjukkan bahwa dari 12 sektor di atas, hanya pendidikan tinggi dan perawatan kesehatan yang telah mengeliminasi pembatasan kepemilikan asing. Pendidikan tinggi memiliki jalur yang lebih jelas untuk pendekatan poros kekuatan dan karenanya akan menjadi fokus dalam analisa selanjutnya.

² Total saham penanaman modal asing di Australia pada 2019 mencapai AUS\$ 1,019 miliar.

Dinamika Perdagangan dan Investasi Internasional

Momentum perdagangan dan investasi internasional semakin menguat selama tiga dekade terakhir. Kesadaran akan manfaat perdagangan internasional mendorong semakin banyaknya perjanjian perdagangan yang muncul, dari hanya 22 pada tahun 1990 menjadi 305 perjanjian di tahun 2019 (World Trade Organization, 2020a). Meluasnya rantai nilai global, di mana tahapan produksi sebuah produk tersebar di berbagai negara, membuat perjanjian perdagangan yang menjamin aliran perdagangan dan investasi internasional menjadi lebih penting. Terlepas dari adanya peningkatan perdagangan dan investasi internasional, kebijakan-kebijakan yang dibuat saat ini harus mempertimbangkan dua tantangan terbaru, yaitu perang dagang AS-Cina dan pandemi Covid-19.

Meluasnya rantai nilai global, di mana tahapan produksi sebuah produk tersebar di berbagai negara, membuat perjanjian perdagangan yang menjamin aliran perdagangan dan investasi internasional menjadi lebih penting.

Menjamurnya Perjanjian Perdagangan

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dibentuk tahun 1947 berubah menjadi *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 dan telah membentuk sebuah pondasi untuk perjanjian perdagangan yang lebih luas dan yang bisa berkontribusi meningkatkan perdagangan dan investasi global. Perdagangan telah menjadi elemen penting untuk pertumbuhan di negara berkembang, menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, dan barang serta jasa lainnya (Watanabe, 2001). Kerangka kerja WTO menekankan pada pengurangan tindakan tarif dan non-tarif sembari menanggulangi masalah-masalah lainnya yang menghambat perdagangan internasional (Jensen & Gibbon, 2007).

Di bawah WTO, negosiasi perdagangan multilateral adalah pendekatan yang kerap kali digunakan untuk perdagangan internasional. Seiring dengan pertumbuhan WTO, mencapai konsensus di antara anggotanya terbukti sulit. Hal tersebut kemudian menyebabkan penangguhan ronde-ronde negosiasi WTO dalam *Doha Round* yang dimulai pada tahun 2001. Kebuntuan pada perdagangan multilateral membuat banyak negara mengupayakan perjanjian-perjanjian dagang bilateral dan regional.

Negosiasi bilateral umumnya lebih cepat daripada negosiasi perdagangan multilateral dan memberikan fleksibilitas lebih, mengingat dua pihak dapat menyetujui cakupan isu yang lebih luas dibandingkan dalam sebuah negosiasi multilateral (Baucus, 1989). Perjanjian dagang regional mencakup sekelompok negara dalam wilayah geografis tertentu. Kebanyakan perjanjian bilateral dan banyak perjanjian regional telah mengadopsi pendekatan perdagangan preferensial. Dengan kata lain, perjanjian-perjanjian tersebut eksklusif untuk para anggota dan seringkali menjadi hambatan bagi negara-negara non-anggota.

³ Prinsip-prinsip WTO adalah pondasi sistem perdagangan multilateral yang mencakup lima aspek sebagaimana sistem perdagangan yang seharusnya: tanpa diskriminasi, lebih bebas, bisa diprediksi, lebih kompetitif, dan lebih menguntungkan untuk negara-negara yang kurang berkembang (World Trade Organization, n.d.).

Para ekonom perdagangan telah memperingatkan bahwa perjanjian eksklusif semacam ini bisa mengakibatkan efek 'mangkuk spaghetti', di mana banyak aturan antar perjanjian perdagangan saling bertentangan, sehingga meningkatkan biaya transaksi perusahaan (Bhagwati, 2008). Perjanjian bilateral dan regional akhir-akhir ini sepertinya sangat memperhatikan masalah ini sehingga target dan komitmen yang dibuat menyerupai prinsip non-diskriminatif WTO. Menteri perdagangan Indonesia terdahulu mengatakan bahwa, "tanpa memperhatikan prinsip WTO, regionalisme rentan menjadi batu sandungan dan bukan menjadi sebuah keuntungan bagi sistem perdagangan multilateral." (Pangestu, 2011). Beberapa perjanjian terbaru juga telah mengambil bentuk yang diperluas atau perjanjian perdagangan yang 'komprehensif' yang mencakup reformasi investasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kelembagaan.

Rantai Nilai Global

Seiring maraknya perdagangan global, produksi internasional juga semakin berkembang. Negara-negara yang berpartisipasi dalam produksi internasional sering disebut menjadi bagian dari rantai nilai global. Hampir setengah dari perdagangan global berkaitan dengan rantai nilai global. Banyak suku cadang dan komponen berseliweran dari satu negara ke negara lainnya demi mencari proses produksi yang paling efisien. Rantai pasok internasional telah meningkatkan produktivitas dan pendapatan di banyak negara. Selama lebih dari 30 tahun, rantai pasok sudah membantu negara miskin dan berkembang untuk bertumbuh lebih cepat, mengangkat banyak penduduknya dari kemiskinan. Rantai nilai global bisa semakin mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan jika negara-negara berkembang bergabung melalui percepatan reformasi perdagangan dan investasi, sambil meningkatkan koneksi bilateral dan multilateral. Untuk melakukan ini, negara-negara tersebut perlu mengusahakan kebijakan yang terbuka dan lebih terprediksi (Bank Dunia, 2020b).

Mengacu pada data OECD (2013), Indonesia dan Australia relatif kurang terintegrasi dalam rantai nilai global. Partisipasi oleh kedua negara dalam rantai nilai global kebanyakan didorong oleh industri hilir—yaitu, negara lain menggunakan sumber daya alam dari Australia dan Indonesia sebagai bahan mentah. Memang pertambangan adalah sektor utama keterlibatan kedua negara ini dalam rantai nilai global. Perjanjian perdagangan yang sukses antara Indonesia dan Australia seharusnya menciptakan peluang-peluang baru bagi kedua negara untuk terlibat lebih luas dalam rantai nilai global dengan cara berfokus bukan pada industri yang mirip dan bersaing, melainkan yang saling melengkapi.

“Perjanjian perdagangan yang sukses antara Indonesia dan Australia seharusnya menciptakan peluang-peluang baru bagi kedua negara untuk terlibat lebih luas dalam rantai nilai global dengan cara berfokus bukan pada industri yang mirip dan bersaing, melainkan yang saling melengkapi.”

Perang Dagang AS-RRT dan Covid-19

Ketika banyak negara mencoba meningkatkan partisipasi mereka ke rantai pasok internasional, perang dagang AS-RRT dan pandemi Covid-19 memunculkan tantangan serius terhadap perdagangan global. Ketegangan antara Amerika Serikat dan RRT telah merugikan kedua negara tersebut dan juga mitra dagang mereka. Sebuah laporan yang menganalisis perang dagang AS-RRT dari tahun 2018 hingga paruh pertama 2019 mengonfirmasi bahwa balas-membalas tarif merugikan ekonomi kedua negara yang berselisih dan juga perdagangan multilateral (UNCTAD, 2019). Konflik tersebut menyebabkan pengalihan perdagangan, di mana Vietnam, Taiwan, Eropa, dan Meksiko meningkatkan ekspor mereka ke Amerika Serikat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan RRT, sementara RRT pun merespons dengan cara yang sama dengan negara-negara ASEAN (Huang & Smith, 2020). Efek samping lain dari perang dagang ini adalah meningkatnya ketidakpastian investasi. Sebuah studi JP Morgan (Ward & Juvyns, 2019) menemukan bahwa banyak perusahaan merevisi rencana investasi mereka karena perang dagang AS-RRT.

Ketika konflik antara Amerika Serikat dan RRT mulai mereda saat RRT memberikan pengecualian tarif bagi komoditas pangan dan pertanian AS (Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, 2020), ekonomi dunia kembali diguncang pandemi Covid-19 dan penutupan wilayah (lockdown) yang luas sehingga pasokan dan permintaan menukik. WTO telah memprediksi bahwa perdagangan internasional akan menurun sebesar 13-32% di tahun 2020 dan ini akan menular pada PMA yang diprediksi akan jatuh sebesar 40% di tahun 2020 (UNCTAD, 2020; World Trade Organization, 2020). Pandemi ini juga memengaruhi kebijakan perdagangan dan investasi global saat beberapa negara mulai menutup diri dan berusaha mendorong swasembada (Baldwin & Evenett, 2020). Akan tetapi, bergantung pada sumber daya domestik akan membuat negara-negara ini bahkan semakin rentan karena hal tersebut mengurangi keberagaman pasokan selama krisis berlangsung dan industri domestik juga tidak sepenuhnya kebal terhadap krisis global (EAF Editorial Board, 2020). Maka dari itu, pandemi ini harusnya bisa digunakan sebagai peluang bagi banyak negara untuk lebih terlibat dalam perdagangan internasional dan rantai nilai global alih-alih menarik diri.

Indonesia dan Australia tidak terhindar dari kesulitan ekonomi Covid-19. Indonesia kembali memasuki resesi ekonomi untuk pertama kalinya sejak 1998, dengan pertumbuhan PDB negatif di kuartal 2 dan 3 di tahun 2020. Investasi alat dan modal jatuh dari 4,1% di kuartal 4 2019 menjadi 1,7% di kuartal 1 2020 karena tingginya ketidakpastian dan rendahnya harga-harga komoditas (Bank Dunia, 2020a). Australia juga masuk dalam masa resesi pertama kali sejak 30 tahun dengan mencatat pertumbuhan negatif pada kuartal 1 dan 2 di tahun 2020. Pada sisi investasi, pengeluaran modal swasta di Australia jatuh sebesar 1,6% di kuartal 1 2020 dari kuartal 4 2019 (Trading Economics, 2020).

MEMAKSIMALKAN MANFAAT IA-CEPA

Indonesia dan Australia bisa menggunakan IA-CEPA bukan hanya untuk meningkatkan hubungan ekonomi bilateral mereka tetapi juga membantu mencari jalan keluar dari tantangan-tantangan baru yang muncul. Kedua negara ini bisa menggunakan perjanjian IA-CEPA untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global. Kami mengilustrasikan kemungkinan ini dengan dua kasus: perdagangan di makanan dan minuman olahan serta investasi di sektor pendidikan tinggi.

Menggabungkan kekuatan dengan Australia, yang merupakan pemasok pertanian terkemuka, dapat mengamankan bahan mentah yang penting untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia di rantai nilai global makanan olahan.

Manufaktur makanan dan minuman adalah ekspor terbesar kedua Indonesia setelah pertambangan, namun demikian kategori tersebut tingkat kandungan asingnya (*foreign content*) relatif rendah (OECD, 2018). Meskipun merupakan penggerak ekspor, industri makanan dan minuman sangat berorientasi ke pasar domestik—konsumsi luar negeri hanya sekitar 20% dari kegiatan pertambahan nilai domestik. Ini berarti Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspornya. Menggabungkan kekuatan dengan Australia, yang merupakan pemasok pertanian terkemuka, dapat mengamankan bahan mentah yang penting untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia di rantai nilai global makanan olahan. Sebuah preseden sudah terbentuk: Gandum Australia digiling menjadi tepung di Indonesia dan digunakan sebagai bahan mie instan yang diekspor ke seluruh dunia (Greenville, 2019; DFAT, 2020a).

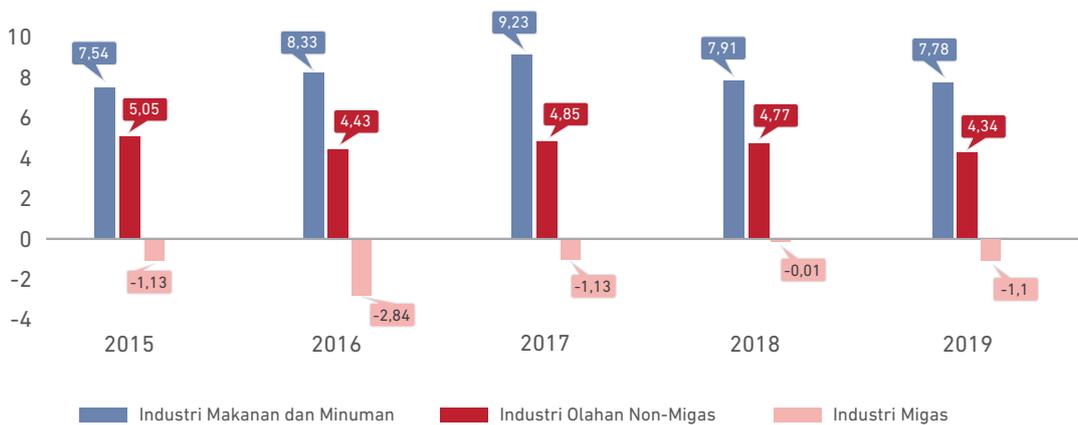
Pada lini investasi, IA-CEPA bisa membantu Indonesia mencapai tujuan pengembangan sumber daya manusia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengedepankan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam masa jabatannya yang kedua (Sekretariat Kabinet RI, 2020a). Australia terkenal dengan institusi pelatihan dan universitasnya yang berkualitas tinggi. Mengundang universitas Australia untuk membuka kampus di Indonesia dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan memudahkan masuknya pelajar internasional, Indonesia dapat melipatgandakan ukuran pasar dan minat investasi penyedia jasa pendidikan Australia. Indonesia bisa menggunakan IA-CEPA untuk mengubah sektor pendidikan dan, dengan kemitraan bersama Australia, menjadi penyedia jasa pendidikan berkelas dunia alih-alih hanya menjadi konsumen pendidikan internasional.

Poros Kekuatan Manufaktur Makanan dan Minuman Indonesia-Australia: Tantangan dan Peluang

Industri makanan dan minuman memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Produksi bahan mentah untuk industri makanan dan minuman di sektor primer (pertanian, perkebunan, dan perikanan) bernilai US\$ 142 miliar, sementara manufaktur produk makanan dan minuman bernilai US\$ 71,4 miliar, selain itu layanan makanan dan minuman menghasilkan US\$ 24 miliar (Bank Indonesia, 2017). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia telah menyatakan bahwa industri makanan dan minuman adalah sebuah pilar penting yang mendukung pertumbuhan baik industri manufaktur maupun ekonomi nasional.

Pentingnya sektor makanan dan minuman tidak perlu diragukan. Sektor ini mewakili 36,4% PDB industri non migas. Pada kuartal pertama 2020, manufaktur makanan dan minuman berkontribusi hampir 20% dari total PDB Indonesia (Kemendag, 2020c). Sektor ini juga merealisasikan tingkat investasi lebih tinggi dalam lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan sektor terdepan lainnya, seperti industri metal dasar dan farmasi, dengan akumulasi hingga Rp293 triliun atau hampir US\$ 21 juta (Deloitte Indonesia, 2020). Meskipun sumber daya alam memainkan peran utama dalam ekonomi Indonesia, industri makanan dan minuman bertumbuh lebih cepat dari industri migas di Indonesia (Gambar 1). Sektor makanan dan minuman bertumbuh lebih dari 7% dari tahun 2015 hingga 2019, mengalahkan sektor migas dan non migas.

Gambar 1.
Tingkat Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman, 2015-2019 (persen)



Sumber: Diambil dan diproses dari Badan Pusat Statistik, 2015-2019.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa ada lebih dari 1,3 juta usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang bergerak di sektor olahan makanan dan minuman (Badan Pusat Statistik, 2017). Meskipun usaha mikro mempekerjakan lebih banyak orang Indonesia ketimbang usaha kecil, menengah dan besar, industri ini didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Termasuk di antaranya perusahaan lokal seperti Indofood, Wings, Mayora dan GarudaFood, serta perusahaan multinasional Nestle, Heinz, Kraft, Unilever, dan Danone (EIBN, 2017).

Tabel 4.
Industri Olahan Makanan dan Minuman di Indonesia

	Mikro	Kecil	Menengah & Besar
Jumlah perusahaan	1.247.414	108.510	6.074
Jumlah pekerja	2.483.810	865.276	882.375
Keluaran bruto (dalam US\$ miliar)	9,16	8,25	74,90
Pertambahan Nilai Harga Pasar (dalam miliar US\$)	2,56	2,32	27,19

Sumber: Diambil dan diproses dari Badan Pusat Statistik. (2017)

Pasar makanan dan minuman domestik yang kuat memberikan dasar yang kokoh bagi industri tersebut untuk membangun keunggulan komparatif di pasar global.

Pertumbuhan kuat industri makanan dan minuman di Indonesia didukung oleh peningkatan daya beli domestik, pertumbuhan populasi, dan realisasi investasi baru (Ragimun & Widodo, 2019). Bank Dunia memperkirakan ada 52 juta rumah tangga Indonesia yang aman secara ekonomi (kelas menengah), atau sekitar 20% dari total populasi. Konsumsi kelas ini telah bertumbuh 12% per tahun sejak 2002 dan mewakili hampir setengah dari konsumsi rumah tangga di Indonesia (Bank Dunia, 2020). Konsumsi kelas menengah juga sudah berubah dari beras sebagai makanan pokok menjadi lebih banyak makanan olahan seperti roti dan mie (DFAT, 2020a). Pasar makanan dan minuman domestik yang kuat memberikan dasar yang kokoh bagi industri tersebut untuk membangun keunggulan komparatif di pasar global. Indomie adalah contoh yang sangat baik untuk hal ini, berkembang menjadi merek kesepuluh terkuat di dunia setelah sukses di pasar domestik yang merupakan pasar mie instan terbesar kedua di dunia (Thomas, 2019). Kemenperin menjadikan manufaktur makanan dan minuman sebagai satu dari lima sektor prioritas dalam inisiatif *'Making Indonesia 4.0'* (Kemenperin, 2018).

Inisiatif ini bertujuan untuk mengakselerasi adopsi manufaktur canggih, dengan target menjadikan Indonesia menjadi produsen makanan dan minuman utama di ASEAN. Rencana ini termasuk memperbaiki produktivitas pertanian hulu dengan mengadopsi teknologi, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah melalui dukungan pendanaan dan teknologi, meningkatkan produksi makanan kemasan modern, dan memperluas ekspor makanan dan minuman (Kemenperin, 2018). Kemenperin juga mengidentifikasi adanya kebutuhan inovasi dalam industri makanan dan minuman untuk memastikan produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Untuk itu, Kemenperin mendirikan Pusat Inovasi Makanan Indonesia atau *Indonesian Food Innovation Center* (IFIC) dengan kemitraan bersama Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia (GAPMMI) (Kemenperin, 2020). Bahkan, IFIC telah diidentifikasi sebagai salah satu lembaga mitra dalam kegiatan Kemitraan Inovasi Pangan Pertanian atau *Agrifood Innovation Partnership* yang diimplementasikan melalui IA-CEPA.

Meskipun permintaan makanan dan minuman domestik kuat, industri ini menghadapi tantangan pasokan domestik. Peningkatan pendapatan telah mengubah konsumsi rumah tangga dan

meningkatkan permintaan daging, produk olahan susu, gandum, dan makanan olahan. Rumah tangga mapan ini tidak hanya meningkatkan konsumsi daging, olahan susu, dan gandum saja tetapi juga produk makanan turunan dari komoditas-komoditas tersebut. Produksi pertanian lokal tidak dapat memenuhi tingginya permintaan dari konsumen maupun industri sehingga impor diperlukan. Kondisi tersebut membuat Australia menjadi mitra perdagangan yang penting. Australia kebanyakan mengekspor bahan mentah dan komoditas makanan semi-olahan ke Indonesia, sementara Indonesia kebanyakan mengekspor produk makanan olahan ke Australia. Pada 2018, Australia mengekspor sekitar US\$2,8 miliar komoditas pertanian, atau sekitar 40% dari total ekspor barangnya ke Indonesia. Dua komoditas impor utama dari Australia adalah hewan hidup dan gandum (DFAT, 2019).

Membangun Poros Kekuatan melalui Kemitraan

Pemberlakuan IA-CEPA sebaiknya bukan sekedar mencari pengurangan tarif untuk barang konsumsi bilateral tetapi mengusahakan tercapainya kemitraan yang menggabungkan kedua negara ke dalam rantai nilai global. Kondisi tersebut akan memastikan manfaat perjanjian ini lebih dari sekedar memastikan produk yang lebih murah bagi konsumen tetapi juga mengaktifkan industri di kedua negara. Mempertimbangkan pasar negara ketiga saat pelaksanaan akan memperbesar pasar yang tercakup dalam perjanjian, dan ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi kedua negara dari pandemi dan berkembang lebih jauh.

Biji-bijian adalah salah satu komoditas terbesar yang diimpor Indonesia dari Australia. Pada 2018, impor biji-bijian bernilai US\$ 639 juta (Badan Pusat Statistik, 2020), sementara ABARES (2015) memproyeksikan bahwa pada 2050 konsumsi gandum Indonesia akan bertumbuh sebesar 113%. Lahan Indonesia kebanyakan tidak cocok untuk menanam biji-bijian, terutama gandum, dalam jumlah besar. Permintaan biji-bijian di Indonesia meningkat, didorong oleh perubahan konsumsi diet, kebutuhan untuk pakan ternak, dan produksi makanan berbasis biji-bijian seperti roti, biskuit, pastri dan mie instan. Menurut Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), ada 28 pabrik tepung di Indonesia dengan kapasitas produksi 11,8 juta metrik ton/tahun di 2019. Pabrik pakan bahkan lebih banyak lagi, memproduksi 25 juta metrik ton/tahun. Produksi makanan dari biji-bijian tidak hanya memenuhi permintaan domestik tetapi juga permintaan ekspor ke negara Asia dan Afrika. APTINDO memperkirakan bahwa pada 2018 ekspor produk berbasis tepung terigu Indonesia bernilai US\$ 871 juta. Wafer, mie instan, dan biskuit manis mendominasi kategori ini (APTINDO , 2019).

Produksi makanan dari biji-bijian tidak hanya memenuhi permintaan domestik tetapi juga permintaan ekspor ke negara Asia dan Afrika.

Indonesia telah menjadi importir gandum terbesar di dunia sejak 2018 (Grain Central, 2018). Indonesia merupakan pasar ekspor terbesar Australia, dengan volume perdagangan tahunan sekitar 4,2 juta ton, atau senilai AUS\$ 1,3 miliar atau hampir US\$ 1 miliar (Grain Growers, 2020). Sebagai salah satu negara produsen gandum terbesar, Australia memasok hampir setengah dari bijih gandum impor yang dibuat menjadi tepung di Indonesia (APTINDO , 2019). Kebanyakan tepung ini dibuat menjadi mie instan yang merupakan komoditas ekspor penting dari Indonesia ke Nigeria dan Afrika Selatan (Sapiie, 2016). IA-CEPA dapat memberikan dasar untuk mengulangi dan memperluas kisah sukses ini, yaitu dengan cara memadukan gandum pangan Australia dengan industri makanan berbasis tepung gandum Indonesia untuk memasok pasar lain.

IA-CEPA memberikan akses preferensial ke lebih dari 99% produk pertanian Australia yang diimpor Indonesia, sehingga usaha yang menggunakan pakan berbahan biji-bijian dan daging sapi sebagai bahan produksi sekarang bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih rendah (DFAT, 2019). Untuk pakan, tarif akan dihilangkan untuk sejumlah 500.000 ton di tahun pertama dan jumlah ini akan ditingkatkan secara progresif ke 775.664 ton di tahun kesepuluh (Kemendag, 2020). Untuk pangan, IA-CEPA mendukung program pelatihan industri melalui 'Grains Partnership'. Penerima manfaat program ini di antaranya adalah pabrik tepung, produsen roti, dan mie. Kemitraan ini juga mengusahakan peningkatan kualitas dan standar keamanan makanan Indonesia untuk menembus pasar ekspor negara-negara lain (DFAT, 2020a).

Selain mendukung komoditas biji-bijian pangan, *Grains Partnership* akan menyediakan pelatihan penggunaan pakan untuk industri ternak Indonesia. Ayam adalah protein yang diproduksi secara domestik dan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Kondisi tersebut mendukung berkembangnya industri penggilingan pakan yang melebihi industri penggilingan tepung baik dalam hal skala maupun pertumbuhannya. Akan tetapi, biaya pakan ternak masih tinggi karena larangan impor bahan mentah, yang membuat ekspor makanan berbasis unggas Indonesia tidak kompetitif (Ferlito & Respatiadi, 2018). Paduan eliminasi tarif dan program pelatihan untuk penggilingan pakan ternak dapat berkontribusi mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing ekspor (DFAT, 2020a).

Daging sapi adalah jenis protein ketiga terbanyak yang dikonsumsi di Indonesia, setelah ayam dan ikan.

Pembukaan impor biji-bijian untuk pakan ternak oleh IA-CEPA mengindikasikan bahwa komoditas sapi potong juga memainkan peran penting dalam perdagangan bilateral. Daging sapi adalah jenis protein ketiga terbanyak yang dikonsumsi di Indonesia, setelah ayam dan ikan. Pada 2018, penduduk Indonesia mengonsumsi 514.800 ton daging sapi³, sementara produksi nasional hanya 497.971 ton. Untuk mencukupi konsumsi tersebut dan juga untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman, Indonesia mengimpor 510.937 ekor sapi potong (Austrade, 2020).

Pertumbuhan konsumsi daging sapi juga telah berimbas pada pertumbuhan industri pengolahan daging. Kemenperin melaporkan bahwa sektor pengolahan daging bertumbuh hampir 30% pada 2019, dengan volume produksi 242.791 ton, meningkat dari 188.391 ton pada 2016 (Kemenperin, 2020a). Maka tidak mengejutkan bahwa pengurangan tarif dan eliminasi untuk impor berbagai daging merah dianggap sebagai salah satu hasil utama IA-CEPA (Tabel 5).

⁴ Angka konsumsi berdasarkan Hirschmann (2020) dan angka produksi berdasarkan Badan Pusat Statistik, diakses melalui pusat data CEIC.

Tabel 5.
Hasil IA-CEPA untuk Biji-bijian dan Daging Merah

Produk	Pemberlakuan penanganan saat masuk	Hasil jangka panjang
Sapi potong hidup	Akses bebas pajak (dari 5% tarif) untuk 575.000 ternak di tahun pertama	Pertumbuhan tahunan 4% untuk volume dan mencapai 700.000 pada tahun keenam. Ulasan untuk peningkatan selanjutnya.
Daging beku	Potongan tarif menjadi 2,5% (dari 5%) dan akses ke volume tak terbatas	Eliminasi tarif setelah 5 tahun
Daging domba	Potongan tarif menjadi 2,5% (dari 5%) dan jaminan akses ke volume tak terbatas	Eliminasi tarif setelah 5 tahun
Pakan ternak	Akses bebas pajak untuk 500.000 ton di tahun pertama	Pertumbuhan 5% secara tahunan dalam volume setelahnya

Sumber: DFAT (2019)

Indonesia dan Australia telah mengeksplorasi konsep 'poros kekuatan' untuk komoditas daging merah di bawah Kemitraan Indonesia-Australia untuk Ketahanan Pangan di Sektor Daging Merah dan Sapi (*Read Meat and Cattle Partnership*) sejak 2013. Dibagi menjadi dua fase masing-masing selama lima tahun, dimulai dengan pembiakan, pemrosesan, transportasi/logistik, dan pengembangan keahlian. Fase terakhir, yang dimulai pada 2019, mengupayakan penyederhanaan kerja sama untuk investasi, rantai pasok, pengembangan kapasitas, inovasi dan ekspor, serta komunikasi (Pemerintah Australia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM] Indonesia, 2020). Dengan demikian, kemitraan ini sudah merencanakan kerja sama di rantai nilai global sektor peternakan beberapa tahun sebelum IA-CEPA dibuat. Dengan perjanjian yang sekarang siap mengeliminasi tarif daging merah dalam lima tahun ke depan, pelajaran dari kemitraan ini akan sangat bermanfaat untuk memastikan kesuksesan program poros kekuatan di sektor makanan olahan berbasis daging.

Studi kelayakan Daging Merah dan Ternak (ProAnd Associates Australia Pty Ltd., 2018) memeriksa kemungkinan pendirian kawasan berikat penggemukan dan pemrosesan daging sapi di Indonesia. Kawasan berikat biasanya membebaskan produk impor dari cukai dan pajak selama produk tersebut kemudian digunakan untuk ekspor. Kawasan berikat daging sapi bisa dipergunakan perusahaan Indonesia untuk memproses sapi potong yang diimpor dari Australia untuk diekspor ke negara lainnya. Dengan adanya IA-CEPA kawasan khusus seperti ini tidak diperlukan lagi, tetapi studi kelayakan ini memberikan informasi penting tentang faktor non-tarif yang bisa menghambat pembentukan poros kekuatan yang efektif.

Beberapa hambatan partisipasi Indonesia di rantai nilai global diidentifikasi oleh studi kelayakan Daging Merah dan Ternak ini. Pertama, fasilitas rantai pendingin (*cold chain*) untuk transportasi dan penyimpanan masih terbatas. Berikutnya adalah "kebijakan rasio indukan 1:5" dari Kementerian Pertanian (Kementan), yang memaksa importir Indonesia untuk mengimpor setidaknya satu sapi indukan untuk setiap lima sapi bakalan yang diimpor (Kementan, 2017). Kebijakan tersebut membebani importir karena membiakkan sapi membutuhkan keahlian khusus yang tidak ada

di Indonesia. Minimnya keahlian ini berarti importir yang mencoba mengembangbiakkan sapi indukan kemungkinan besar akan gagal sehingga imbal balik investasi sangat rendah (Fitzgerald, 2018). Terlebih lagi, mengeksport kembali ternak hidup ke negara-negara lain tidak diijinkan, sehingga importir harus mengurus sapi yang tidak bisa dijual dan tidak produktif. Terakhir, Indonesia belum ada perjanjian *phytosanitary* baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara yang menjadi pasar potensial. Sementara IA-CEPA menghapus hambatan tarif, tantangan dari segi infrastruktur dan maupun kebijakan harus ditanggulangi agar pendekatan poros kekuatan dapat bekerja efektif di sektor ini.

Sebuah sub-sektor yang secara singkat disebutkan dalam dokumen ECP adalah rantai nilai global makanan halal. Akan tetapi, kapasitas Indonesia di sektor ini masih relatif kecil meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Bahkan ekspor makanan

Perbedaan standar dan sertifikasi halal antara Indonesia dan negara lain juga bisa menjadi hambatan non-tarif untuk ekspor produk halal Indonesia.

halal Indonesia tertinggal dari Brazil, Thailand, dan Turki. Meskipun Kemendag telah mulai mengeksplorasi peluang ekspor produk halal ke negara-negara anggota *Organization of Islamic Cooperation* (OIC), banyak usaha lokal yang tidak mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai hal penting dalam kegiatan usaha mereka. Perbedaan standar dan sertifikasi halal antara Indonesia dan negara lain juga bisa menjadi hambatan non-tarif untuk ekspor produk halal Indonesia. Hambatan ini termasuk dalam dialog perdagangan Kemendag dengan negara-negara OIC dan non-OIC (Kemendag, 2020d; Kemendag, 2019). Untuk mendorong industri ini lebih jauh, Kemenperin sedang membuat rencana untuk Kawasan Industri Halal baru (Kemenperin, 2020b).

Makanan dan minuman, kosmetik, dan produk farmasi adalah tiga sektor industri halal yang telah mengenyam ekspor sukses dengan menghasilkan surplus perdagangan sebesar US\$ 281 juta, US\$ 20 juta, dan US\$ 26 juta (Kemendag, 2020d). Dari 2015 hingga 2019, ekspor makanan dan minuman halal ke negara anggota OIC meningkat sebanyak 5,51% (Kemendag, 2020d). Contoh terbaru kesuksesan rantai nilai global produk halal adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan Arab Saudi dengan pemerintah kabupaten Payakumbuh untuk mengeksport 20 ton rendang (Rahmat, 2019). Kebanyakan daging sapi dalam produk tersebut berasal dari Australia, yang memperlihatkan potensi IA-CEPA untuk meningkatkan keterkaitan industri peternakan Australia dan industri makanan halal Indonesia untuk memasok pasar halal global.

Berinvestasi di Poros Kekuatan Pendidikan Tinggi Indonesia-Australia

Baik Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) menyoroti lusinan sektor di mana minat investasi Indonesia-Australia

Kemendag kemudian juga mengidentifikasi tiga sektor yang melaluinya kemitraan ekonomi yang lebih luas akan tercapai: pendidikan dan pelatihan kejuruan, pendidikan tinggi, dan kesehatan.

selaras: pendidikan dan pelatihan kejuruan, pendidikan tingkat universitas, pariwisata, konstruksi, pertambangan, energi, rumah sakit, pengelolaan air limbah, perawatan lansia, transportasi, telekomunikasi, dan layanan profesional (Direktorat Negosiasi Bilateral, n.d.; DFAT, 2019). Kemendag kemudian juga mengidentifikasi tiga sektor yang melaluinya kemitraan ekonomi yang lebih luas akan tercapai: pendidikan dan pelatihan kejuruan, pendidikan tinggi, dan

kesehatan. Akan tetapi, membandingkan perjanjian ini dengan daftar negatif investasi yang masih berlaku selama penulisan makalah ini (DNI tahun 2016) menunjukkan bahwa hanya pendidikan tinggi dan kesehatan yang memiliki persyaratan lebih baik dalam IA-CEPA.

Pendidikan dan pelatihan kejuruan di IA-CEPA masih menghadapi larangan yang sama seperti DNI tahun 2016, yaitu terbatas pada 67% kepemilikan asing. Batasan ini tidak dihapuskan meskipun Indonesia menyatakan minatnya dalam meningkatkan kerja sama pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan Australia (The Jakarta Post News Desk, 2019) dan penelitian pun mengkonfirmasi minat ini (Sebastian, Rish, & Evans, 2019). Lampiran pada Surat Pendamping untuk Kerja Sama Ekonomi memberikan sedikit petunjuk tentang apa yang dimaksud dengan 'kerja sama'. Kerja sama pendidikan dan pelatihan kejuruan ditujukan untuk mengembangkan standar dan kapasitas nasional Indonesia, yang kemungkinan besar secara pemerintah-ke-pemerintah. Penyedia pendidikan dan pelatihan kejuruan Australia hanya diharapkan untuk mengembangkan modul pelatihan berdasarkan standar nasional ini dengan berkonsultasi dengan penyedia jasa Indonesia, sejalan dengan model joint venture yang dijabarkan dalam IA-CEPA (Birmingham & Lukita, 2019).

Akan tetapi, di sektor pendidikan tinggi dan kesehatan, IA-CEPA memperbaiki ketentuan yang ada dalam DNI 2016. Daftar negatif hanya mengizinkan rumah sakit asing di beberapa provinsi Indonesia bagian Timur dan batasan ini dieliminasi dalam IA-CEPA. IA-CEPA juga menghapus pembatasan untuk universitas yang ada dalam Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 yang hanya mengizinkan universitas asing di kawasan ekonomi khusus. Karena perjanjian ini, rumah sakit dan universitas milik Australia dapat didirikan di mana saja di Indonesia. Akan tetapi, hak istimewa ini mungkin tidak bertahan lama karena pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mempertimbangkan pembukaan kedua sektor ini untuk investor asing lainnya (Rolindrawan & Muskitta, 2019).

Namun tetap saja, perubahan-perubahan ini disambut oleh beberapa perusahaan Australia. *Aspen Medical* yang berkantor pusat di Canberra dan *Docta* yang berkantor pusat di Sydney telah menandatangani perjanjian *joint venture* dengan PT Jaya Sarana, sebuah perusahaan BUMN di Jawa Barat, untuk mengembangkan 650 klinik dan 23 rumah sakit di setiap penjuru provinsi tersebut (Mizen, 2020). *Monash University* telah mengumumkan niatnya untuk membuka kampus program S2 dan S3 di Jakarta (Monash University, 2020). *Central Queensland University* juga telah mulai menawarkan program gelar ganda melalui kemitraan dengan Universitas Bakrie di Jakarta (Universitas Bakrie, 2020). Untuk mendorong hal ini lebih lanjut, Indonesia dan Australia sebaiknya menyatukan kekuatan untuk menciptakan poros kekuatan pendidikan tinggi melalui reformasi kebijakan imigrasi bagi mahasiswa internasional.

“Untuk mendorong hal ini lebih lanjut, Indonesia dan Australia sebaiknya menyatukan kekuatan untuk menciptakan poros kekuatan pendidikan tinggi melalui reformasi kebijakan imigrasi bagi mahasiswa internasional.”

Pelajaran dari Seberang Selat

Pendidikan internasional adalah ekspor keempat terbesar Australia yang bernilai lebih dari AUS\$ 40 miliar. Hampir setengah dari kegiatan ekonomi di sektor ini adalah dari mahasiswa internasional yang belajar di universitas Australia (Department of Education, Skills and Employment, 2020). Pemerintah Australia telah menutup negaranya untuk pelancong

internasional karena pandemi dan karenanya IA-CEPA menyediakan solusi bagi universitas Australia yang menghadapi kekeringan mahasiswa internasional yang sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam hal pengembangan sumber daya manusia.

Lebih dari dua pertiga pelajar internasional di Australia datang dari Asia dengan hampir 10.000 mahasiswa datang dari Indonesia pada tahun 2018 (Ferguson & Sherrell, 2019). Angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan RRT dan India yang mengirimkan total 200.000 pelajar, atau bahkan Vietnam (15.000), dan Malaysia (14.000). Akan tetapi, mengingat hanya 16% masyarakat Indonesia berusia 25-34 yang masuk Universitas, maka potensi pasar Indonesia masih sangat luas (OECD, 2019). Dengan pelajar internasional – termasuk dari Indonesia – dilarang masuk Australia, universitas Australia perlu mempertimbangkan untuk memanfaatkan kepemilikan penuh yang dimungkinkan IA-CEPA sebagai strategi alternatif untuk menarik minat calon mahasiswa dari Indonesia. Tindakan cepat universitas Australia akan menjadi penentu keberhasilan di sini, karena Indonesia juga berencana segera membuka sektor ini untuk investor dari negara lain.

Indonesia dapat meningkatkan kemungkinan menerima PMA pendidikan dari Australia dengan menyambut mahasiswa dari negara lain.

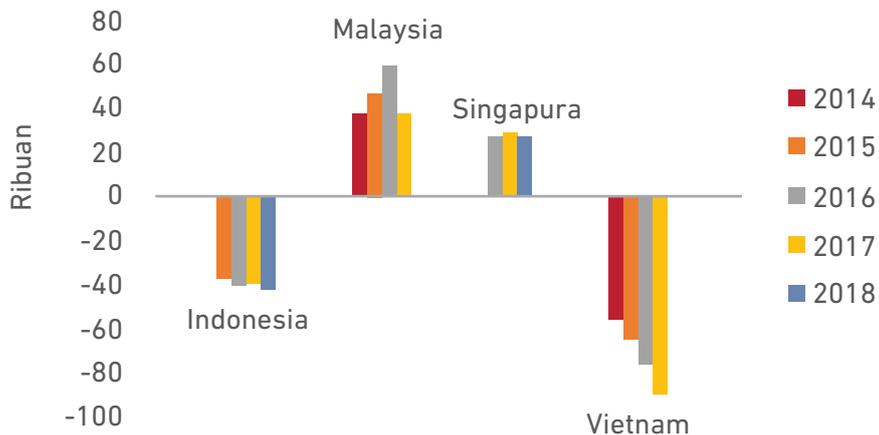
Di sisi lain, Indonesia dapat meningkatkan kemungkinan menerima PMA pendidikan dari Australia dengan menyambut mahasiswa dari negara lain. Pengalaman Malaysia bisa menjadi pelajaran berharga di sini. Pada 2006, Malaysia membuat rencana untuk menjadi pusat pendidikan tinggi regional di tahun 2020 dengan membebaskan pasokan dan permintaan (Asari et al., 2017). Di sisi pasokan, universitas-universitas asing diizinkan masuk ke Malaysia. Universitas dari Britania Raya, Australia, Belanda, Singapura, India, dan RRT membuka kampus-kampus cabang mereka di berbagai penjuru Malaysia. Persaingan yang meningkat juga mendorong universitas lokal untuk meningkatkan kualitas mereka demi menarik mahasiswa lokal maupun internasional.

Di sisi permintaan, proses imigrasi yang mudah menjadi fokus reformasi. Fasilitas satu pintu untuk pendaftaran pelajar internasional diadakan, aplikasi visa pelajar disederhanakan, dan beberapa aplikasi visa bahkan disubsidi ketika masih dalam fase awal upaya pembukaan sektor ini. Strategi pasokan-permintaan ini sangat sukses. Malaysia menjadi eksportir pendidikan tinggi kesembilan terbesar di dunia pada 2014, menarik lebih dari 100.000 mahasiswa internasional. Angka tersebut bertumbuh menjadi 120.000 pada 2016 dan menuju 250.000 pada 2025 (Asari et al., 2017; Chin, 2019; Yeoh, 2016). Malaysia telah menjadi pusat pendidikan regional, mencatat arus masuk netto mahasiswa internasional tertinggi⁵ jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya (Gambar 2).

⁵ Arus masuk netto mahasiswa dapat dipahami sebagai perbedaan antara pelajar asing yang belajar di negara tuan rumah dan pelajar asal negara tuan rumah belajar di luar negeri.

Gambar 2.
Malaysia sebagai Pusat Pendidikan Regional

Arus masuk netto pelajar internasional (masuk – keluar)



Sumber: UIS Statistics

Berbeda dengan strategi Malaysia yang meningkatkan permintaan melalui penyederhanaan aplikasi visa pelajar, sistem imigrasi di Indonesia mensyaratkan pelajar asing untuk melalui berbagai tahapan aplikasi yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Departemen Imigrasi (Universitas Pelita Harapan. n.d.) Proses dimulai dengan mengajukan Izin Belajar dari Kemendikbud, yang nantinya akan dibutuhkan untuk mengajukan Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) ke Departemen Imigrasi. Akan tetapi, VITAS tidak secara otomatis memberikan izin tinggal di Indonesia, karena itu para mahasiswa harus meminta Izin Tinggal Terbatas (E-ITAS) saat tiba di Indonesia. Akhirnya, saat studi berakhir, mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan izin keluar untuk membatalkan ITAS mereka. Jika ITAS tidak dibatalkan, maka bisa sulit mendapatkan visa kembali di masa depan.

Meskipun beberapa proses ini sekarang sudah online, namun calon mahasiswa tetap harus pergi ke kedutaan atau kantor imigrasi beberapa kali. Proses yang rumit seperti ini membuat Indonesia tidak menarik bagi mahasiswa internasional. Potensi jumlah mahasiswa tentu saja merupakan faktor terpenting dalam keputusan PMA universitas asing. Meskipun potensi mahasiswa lokal cukup besar, bergantung pada populasi ini saja akan membatasi potensi pertumbuhan di masa mendatang. Terlebih lagi, membuka untuk lebih banyak mahasiswa internasional akan menguntungkan universitas lokal juga sambil mendorong mereka untuk meningkatkan standar kualitas. Reformasi untuk memperbesar aliran mahasiswa pelajar internasional harus menjadi komponen integral dalam membangun poros kekuatan sektor pendidikan Indonesia-Australia.

POROS KEKUATAN IA-CEPA: BEBERAPA HAMBATAN DOMESTIK

Rumitnya regulasi perdagangan dan investasi Indonesia, ditambah terbatasnya pengalaman kerja sama antara sektor swasta Australia dan Indonesia akan terus menjadi tantangan terhadap perdagangan dan investasi.

Terlepas dari potensi manfaat IA-CEPA untuk Indonesia dan Australia, mengesahkan perjanjian ini tidak otomatis memastikan upaya pembukaan pasar dilaksanakan. Rumitnya regulasi perdagangan dan investasi Indonesia, ditambah terbatasnya pengalaman kerja sama antara sektor swasta Australia dan Indonesia akan terus menjadi tantangan terhadap perdagangan dan investasi (DFAT, 2020a). Selain mengenali tantangan eksternal yang bisa menghambat efektivitas perjanjian, pembuat kebijakan di Indonesia perlu mengatasi dua kebijakan domestik yang berpotensi menghambat keberhasilan model ini.

Pertama, implementasi perjanjian ini mungkin bisa terdampak oleh UU Cipta Kerja. UU ini adalah upaya reformasi besar yang merevisi berbagai aturan dalam UU di berbagai sektor. Sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasi UU Cipta Kerja bisa mengalihkan perhatian pemerintah Indonesia dari IA-CEPA. Revisi ini juga bisa mencakup sektor dalam IA-CEPA, misalnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan revisi ini seharusnya proses sertifikasi halal disederhanakan dan ini sejalan dengan konsep poros kekuatan makanan halal di bawah IA-CEPA. Akan tetapi, rinciannya akan tergantung pada peraturan pelaksanaannya yang belum dikeluarkan pada saat penulisan makalah ini, sehingga sulit untuk mengukur dampak potensi omnibus law terhadap perjanjian ini (SSEK, 2020).

Kebijakan lain yang mungkin berbenturan dengan model poros kekuatan adalah strategi substitusi impor yang diadvokasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kemenperin sedang menyiapkan peta jalan substitusi impor hingga 35% sampai 2022 (Kemenperin, 2020c). Selain itu, Kemenperin juga telah mengembangkan instrumen pengendalian impor, termasuk larangan terbatas, penerapan inspeksi sebelum pengiriman, dan pengaturan pelabuhan di Indonesia Timur sebagai titik masuk komoditas prioritas. Tanpa pertimbangan yang matang, kebijakan pengelolaan impor ini bisa mengancam model poros kekuatan, terutama untuk makanan dan minuman olahan. Mengingat keselarasan kebijakan Kemenperin dan IA-CEPA adalah kunci sukses pelaksanaan, maka kementerian ini sebaiknya langsung dilibatkan dalam Komite Kerja Sama Ekonomi alih-alih secara tidak langsung melalui IFIC.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kami merekomendasikan pelaksanaan IA-CEPA untuk berfokus kepada sektor yang saling melengkapi. Hal ini paling baik dicapai melalui model poros kekuatan yang menggunakan bahan mentah dari Australia untuk diolah di Indonesia, ataupun sebaliknya, yang kemudian diekspor ke pasar lain. Kedua negara harus memanfaatkan komprehensifnya perjanjian ini untuk mendorong perbaikan bukan hanya dalam kebijakan perdagangan dan investasi, tetapi juga reformasi kebijakan ekonomi domestik yang lebih luas.

Makalah ini mengedepankan dua kasus dengan potensi keberhasilan tertinggi dalam rantai nilai global guna memberikan ilustrasi prospek poros kekuatan perdagangan dan investasi IA-CEPA: perdagangan melalui poros kekuatan makanan dan minuman olahan, serta investasi di poros kekuatan pendidikan tinggi. Keduanya adalah sektor di mana Indonesia sudah memiliki keuntungan komparatif atau kebutuhan mendesak untuk perbaikan yang bisa didukung oleh Australia. Rekomendasi khusus kami untuk kedua sektor ini adalah:

- i. Mempertimbangkan risiko program substitusi impor, Program Kerja Sama Ekonomi harus memastikan substitusi impor tidak berdampak pada sektor yang dicakup oleh IA-CEPA. Mengingat Indonesia tidak bisa memproduksi gandum namun memiliki kemampuan kuat dalam manufaktur makanan berbahan dasar gandum, impor bahan baku akan diperlukan untuk memastikan keberhasilan poros kekuatan makanan dan minuman olahan. Program Kerja Sama Ekonomi harus melibatkan Kemenperin secara lebih langsung dengan memasukkan Kementerian tersebut ke dalam Komite Kerja Sama Ekonomi. Melibatkan Kemenperin dalam Komite Kerja Sama Ekonomi akan memastikan penyesuaian kebijakan industri yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan poros kekuatan bisa segera dilaksanakan.
- ii. Kementan sebaiknya mengubah Pasal 7 (1) Permentan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. "Kebijakan rasio indukan 1:5" meningkatkan biaya importir yang bisa menghalangi mereka untuk sepenuhnya menggunakan peningkatan kuota impor yang sudah diatur dalam IA-CEPA. Hal tersebut akan melambatkan partisipasi aktif Indonesia dalam rantai nilai global makanan berbahan dasar daging dan mengurangi potensi poros kekuatan.
- iii. Indonesia harus memiliki strategi global untuk pendidikan tinggi. Dengan dilarangnya mahasiswa internasional untuk masuk ke Australia, maka universitas di negara tersebut perlu menemukan alternatif untuk mengakomodasi pasar terbesarnya: Asia. Populasi Indonesia yang besar dan relatif muda memberikan basis konsumen yang menarik, tetapi menyambut mahasiswa dari negara lain akan meningkatkan potensi pasar. Menarik minat mahasiswa internasional akan membutuhkan penyederhanaan proses aplikasi. Mengintegrasikan izin Belajar, Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Tinggal Terbatas (E-ITAS) menjadi sebuah visa pelajar tunggal sebaiknya dipertimbangkan, demikian juga dengan penghapusan persyaratan izin keluar.

-
- iv. Indonesia sebaiknya menggunakan pembukaan investasi melalui IA-CEPA sebagai pengalaman belajar sembari mengembangkan sektor pendidikan tinggi. IA-CEPA memberikan peluang belajar bagi pembuat kebijakan Indonesia dan penyedia jasa pendidikan Australia. Pengalaman awal dengan satu negara bisa membantu pembuat kebijakan di Indonesia mengidentifikasi hambatan investasi yang tidak diduga sembari meminimalisasi resiko kegagalan sebelum membuka sektor ini lebih luas. Investor Australia juga akan menerima perhatian lebih dari pihak yang berwenang yang ingin menunjukkan manfaat perjanjian ini dan akan diuntungkan dengan memulai lebih awal dibandingkan kompetitor dari negara lain. Pelajaran ini akan berguna untuk membentuk reformasi yang lebih menyeluruh di sektor pendidikan tinggi di masa mendatang.

REFERENSI

ABARES. (2015). *What Indonesia wants: Analysis of Indonesia's food demand to 2050*. Diambil dari <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/outcomes-documents/Pages/outcomes-goods>

APTINDO. (2019). *Growth and Partnership Opportunities in the Indonesian Flour Milling Sector*. Diambil dari http://www.giwa.org.au/_literature_251432/2019_GIWA_Forum_Erwin_Sudharma_Indonesian_Flour_Milling

Asari F.F., Muhammad, S., & Khalid, P.Z. (2017). Globalisation and liberalisation of Malaysian Higher Education. *ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities*, 1-14.

ASEAN. (2020). *ASEAN hits historic milestone with signing of RCEP*. Diambil dari <https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/>

Austrade. (2020). *Export markets - Indonesia*. Diambil dari <https://www.austrade.gov.au/australian/export/export-markets/countries/indonesia/industries/agribusiness>

Australian Bureau of Statistics. (2020, May 7). *International Investment Position, Australia: Supplementary Statistics 2019*. Diambil dari Australian Bureau of Statistics: <https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/5352.02019?OpenDocument>

Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistical Yearbook of Indonesia 2016*. Diambil dari https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Indonesia-2016--_rev.pdf

Badan Pusat Statistik. (2019). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Ekspor*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Impor Biji Gandum dan Meslin Menurut Negara Asal Utama 2010-2019*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2016/impor-biji-gandum-dan-meslin-menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html>

Baldwin, R., & Evenett, S. (2020). *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*. London: CEPR Press.

Bank Dunia. (2020, 30 Januari). *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*. Diambil dari <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2020/01/30/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>

Bank Dunia. (2020a). *Indonesia Economic Prospect: The Long Road to Recovery*. Jakarta: World Bank Group.

Bank Dunia. (2020b). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. Washington DC: World Bank Group.

Bank Indonesia. (2017). *Economic Data*. Diambil dari <https://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/real-sector/Contents/Default.aspx>

Baucus, M. (1989). *A New Trade Strategy: The Case for Bilateral Agreements*. *Cornell International Law Journal*, 1-24.

Bhagwati, J. (2008). *Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade*. Oxford University Press.

Birmingham, S., & Lukita, E. (2019). *Medium Term Objectives for Economic Cooperation Under the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*.

Chaney, T. (2011). The Gravity Equation in International Trade: An Explanation. *Journal of Political Economy*.

Chin, Y. F. (2019). Malaysia: from hub to exporter of higher education and implications. *International Journal of Business and Social Sciences*, 10 (2). 48-54.

Deloitte Indonesia. (2020). *Deloitte Indonesia Business and Industry Updates: The pivotal role of trust: Impact of COVID-19 on the food and beverage sector in Indonesia*. Diambil dari <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/consumer-business/id-consumer-covid19-2020.pdf>

Department of Education, Skills and Employment. (2020). *Education infographic Australia 2019*. Diambil dari https://internationaleducation.gov.au/research/Research-Snapshots/Documents/RS_Export%20income%20infographic%202019.pdf

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia [DFAT] dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag]. (2009). *Australia-Indonesia FTA's Joint Feasibility Study*.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia [DFAT]. (2019). *Outcomes: Goods*. Diambil dari <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/outcomes-documents/Pages/outcomes-goods>

Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT]. (2019a). *IA-CEPA-Key Outcomes for Australia*. Diambil dari www.dfat.gov.au/fta/iacepa

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia [DFAT]. (2020a). *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Economic Cooperation Program (ECP) Investment Design*. Diambil dari Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/investment-design-ia-cepa-ecp-may-2020-web-vers.pdf>

Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT]. (2020b). *IA-CEPA Text and Associated Documents*. Diambil dari Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/default>

Department of Foreign Affairs of Australia [DFAT]. (2020c). *Composition of Trade Australia 2018-2019*. Diambil dari <http://dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/Pages/dfat-adjustments-to-abs-official-trade-data.aspx>

Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT]. (n.d.). *China country brief*. Diambil dari China: <https://www.dfat.gov.au/geo/china/Pages/china-country-brief>

Direktorat Negosiasi Bilateral. (2020, 27 Mei). *IA-CEPA: Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Diambil dari http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20190311_fact-sheet-indonesia-australia-cepa2.pdf.

Direktorat Negosiasi Bilateral. (n.d.). *IA-CEPA: Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Diambil dari http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20190311_fact-sheet-indonesia-australia-cepa2.pdf

EAF Editorial Board. (2020, 8 Juni). *Securing supply chains and global production after COVID-19*. Diambil dari East Asia Forum: <https://www.eastasiaforum.org/2020/06/08/securing-supply-chains-and-global-production-after-covid-19/>

EIBN. (2017). *EIBN Sector Report: Food & Beverage*. Diambil dari <https://indonesien.um.dk/~media/indonesien/tc/sector%20reports%20eu-indo/food/2017%20eibn%20sector%20report%20food%20and%20beverage.pdf?la=en>.

Ferguson, H., & Sherrell, H. (2019). *Overseas Students in Australian Higher Education: A Quick Guide (2018-2019)*. Diambil dari https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1819/Quick_Guides/OverseasStudents

Ferlito, C., & Respatiadi, H. (2018, 11). *Policy Reforms on Poultry Industry in Indonesia*. Diambil dari Center for Indonesian Policy Studies: <https://repository.cips-indonesia.org/media/271878-policy-reform-on-poultry-industry-in-ind-52817e14.pdf>

Fitzgerald, D. (2018). *Indonesia's breeder cattle protocol: Is anyone following the rules?* Diambil dari <https://www.abc.net.au/news/rural/2018-05-22/indonesian-cattle-importers-unlikely-to-comply-with-breeder-rule/9782172>

Grain Central. (2018,9 Februari). *Indonesia now world's biggest wheat importer: USDA*. Diambil dari <https://www.graincentral.com/cropping/grains/indonesia-now-worlds-biggest-wheat-importer-usda/>

Grain Growers. (2020). *Indonesian Free Trade Agreement Ratification Provides Green Shoots of Economic Recovery*. Diambil dari <https://www.graingrowers.com.au/indonesian-free-trade-agreement-ratification-provides-green-shoots-of-economic-recovery/>

Greenville, J. (2019, 4 November). *Australia's place in global agriculture and food value chains*. Diambil dari Australia Government, Department of Agriculture, Water, and the Environment (ABARES): <https://www.agriculture.gov.au/abares/publications/insights/global-agriculture-and-food-value-chains>

Hirschmann, R. (2020). *Per capita beef consumption in Indonesia 2009-2019*. Diambil dari Statista: <https://www.statista.com/statistics/757351/indonesia-beef-consumption-per-capita/>

Huang, Y., & Smith, J. (2020). *In U.S.-China Trade War, New Supply Chains Rattle Markets*. Diambil dari Carnegie Endowment for International Peace: <https://carnegieendowment.org/2020/06/24/in-u.s.-china-trade-war-new-supply-chains-rattle-markets-pub-82145>

Jayani, D. (2020, 29 Januari). *10 Negara Investor Terbesar Indonesia Sepanjang 2019*. Diambil dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/10-negara-investor-terbesar-indonesia-sepanjang-2019>

Jensen, M. F., & Gibbon, P. (2007). *Africa and the WTO Doha Round: An Overview*. *Development Policy Review*, 5-24.

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat. (2020, 21 Mei). *USDA and USTR Announce Continued Progress on Implementation of U.S.-China Phase One Agreement*. Diambil dari <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/may/usda-and-ustr-announce-continued-progress-implementation-us-china-phase-one-agreement>

Kedutaan Besar Australia di Jakarta. (2019). *Trade Partnership with Indonesia*. Diambil dari <https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/cooperation-between-australia-and-indonesia/trade-partnership-with-indonesia>

Kedutaan Besar Indonesia di Canberra. (2020). *Temporary Prohibitions of Entry (Travel Restriction) into Indonesia for Foreigners*. Diambil dari <https://www.kbri-canberra.go.id/en/>

Konsulat Jenderal Australia di Bali. (2020). *Latest travel advice for Indonesia*. Diambil dari <https://bali.consulate.gov.au/>

Konsulat Jenderal Australia di Makassar. (2020). *Message from Consul-General Ms Bronwyn Robbins*. Diambil dari <https://makassar.consulate.gov.au/>

Konsulat Jenderal Australia di Surabaya. (2020). *Message from the Consul-General Chris Barnes*. Diambil dari <https://surabaya.consulate.gov.au/>

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne-Victoria, Australia. (2020). *Ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Akan Dorong Kerja Sama Ekonomi Antara Indonesia dan Australia*. Diambil dari <https://kemlu.go.id/melbourne/id/news/4701>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag]. (2019). *Kemendag terus gali peluang masuki pasar produk halal negara anggota OKI*. Diambil dari <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/kemendag-terus-gali-peluang-masuki-pasar-produk-halal-negara-anggota-oki-1>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag]. (2020). *Appendix 2-A*. Diambil dari http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191203_2a1-appendix-2a1-tariff-rate-quotas.pdf

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag]. (2020a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership)*. Jakarta.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag]. (2020b). *Naskah Akademik Rancangan Undang-*

Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag]. (2020c). *Kemendag Ajak Pelaku Usaha Indonesia Manfaatkan Peluang Ekspor Mamin ke Spanyol*. Diambil dari https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/7uKhMJ7gNwcLms5hZMVMfu61R073C94jodopVaAh.pdf

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia [Kemendag]. (2020d). *Sinergierat pemerintah pusat dan masyarakat dorong Indonesia menjadi produsen halal dunia*. Diambil dari <https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/sinergi-erat-pemerintah-dan-masyarakat-dorong-indonesia-menjadi-pusat-produsen-halal-dunia>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia [Kemenperin]. (2018). *Making Indonesia 4.0*. Diambil dari <https://www.kemenperin.go.id/download/18384>.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia [Kemenperin]. (2020, 27 Januari). *Pemerintah Siapkan Pusat Inovasi Industri Makanan-Minuman*. Diambil dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21453/Pemerintah-Siapkan-Pusat-Inovasi-Industri-Makanan-Minuman>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia [Kemenperin]. (2020a, 4 Mei). *Kemenperin Pacu Produktivitas Industri Pengolahan Daging*. Diambil dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21702/Kemenperin-Pacu-Produktivitas-Industri-Pengolahan-Daging>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia [Kemenperin]. (2020b). *Kemenperin akselerasi pengembangan kawasan industri halal*. Diambil dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21937/Kemenperin-Akselerasi-Pengembangan-Kawasan-Industri-Halal>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia [Kemenperin]. (2020c). *Kemenperin Susun Peta Jalan Wujudkan Substitusi Impor 35% di Tahun 2022*. Diambil dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21885/Kemenperin-Susun-Peta-Jalan-Wujudkan-Substitusi-Impor-35-di-Tahun-2022> Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. (2016). *Analisis Strategi Posisi Runding Dalam Memperkuat Kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia [Kementan]. (2017). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 02/PERMENTAN/PK.440/2/2017*. Diambil dari http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_mentan/Permentan%2002-2017%20Perubahan%20Permentan%20Pemasukan%20Ternak%20Ruminansia%20ke%20dalam%20wilayah%20RI.pdf

Mizen, R. (2020). Aspen Medical, Docta ink \$1.3bn Indonesia Healthcare Deal. *Australian Financial Review*.

Monash University. (2020, 10 Februari). *Monash University announces new campus in Indonesia*. Diambil dari <https://www.monash.edu/news/articles/monash-university-announces-new-campus-in-indonesia>

Neo, P. (2020, 16 Juni). *Free trade frustration: Cold-chain and cattle disputes hold Indonesia back despite Australia deal*. Diambil dari Food Navigator-Asia.com: <https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2020/06/16/Free-trade-frustration-Cold-chain-and-cattle-disputes-hold-Indonesia-back-despite-Australia-deal>

Observatory of Economic Complexity. (2019). *Country to Country Report: Australia and Indonesia*. Diambil dari <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/aus/partner/idn>

Observatory of Economic Complexity. (2020). *Country to Country Report: Australia - Indonesia*. Diambil dari <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/aus/partner/idn>

OECD. (2013, Mei). *Global Value Chain: Australia*. Diambil dari <http://www.oecd.org/sti/ind/GVCs%20-%20AUSTRALIA%20.pdf>

OECD. (2018). *Trade in Value Added: Indonesia*. Diambil dari <https://www.oecd.org/industry/ind/TIVA-2018-Indonesia.pdf>

OECD. (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.

Pangestu, M. E. (2011). Address to a conference on 'Asia Pacific Perspectives on the Future of the World Trade

System. *Washington Report Vol.3, July 2011*. The East West Center.

Parlemen Australia. (2005, 4 April). *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia*. Diambil dari <https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22media%2Fpressrel%2FRWMF6%22>

Parlemen Australia. (2019). *Customs Amendment (Growing Australian Export Opportunities Across the Asia-Pacific) Bill 2019*. Diambil dari https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bld=r6426

Parlemen Indonesia. (2020). *Paripurna DPR Sahkan Ratifikasi IA-CEPA*. Diambil dari <http://dpr.go.id/berita/detail/id/27599/t/Paripurna+DPR+Sahkan+Ratifikasi+IA-CEPA>

Pemerintah Australia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM] Indonesia. (2020). *The Indonesia Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector*. Diambil dari Red Meat and Cattle Partnership: <http://www.redmeatcattlepartnership.org/about/1/our-program>

Pinandita, A. (2019, 12 17). Indonesia, China to strengthen strategic partnership in 2020. *The Jakarta Post*. Jakarta, Indonesia. Diambil dari The Jakarta Post.

ProAnd Associates Australia Pty Ltd. (2018). *Feasibility Assessment of a Beef Processing Bonded Zone in Indonesia: Final Report*.

Rahmat, S. (2019). *Payakumbuh Ekspor Rendang untuk Kebutuhan Musim Haji 2019*. Diambil dari Antara: <https://www.antaraneews.com/berita/832337/payakumbuh-ekspor-rendang-untuk-kebutuhan-musim-haji-2019>

Ragimun, & Widodo, S. (2019). Strategy of Strengthening Food and Beverage Industry in Indonesia. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 102-110.

Rolindrawan, W., & Muskitta, R. (2019). *Indonesia Considers Opening Investment Opportunities for Foreign Universities and Hospitals*. SSEK Legal Updates.

Sapiie, M. A. (2016, 01 26). *Indonesia to strengthen economic cooperation with African countries*. Diambil dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2016/01/26/indonesia-strengthen-economic-cooperation-with-african-countries.html>

Sebastian, E., Rish, V., & Evans, K. (2019). *Stronger Education Partnerships: Opportunities for Australian Education and Training Providers in Indonesia*. Australia-Indonesia Centre.

Sekretariat Kabinet RI. (2020a). *Indonesia-Australia Roundtable Business, 10 Februari 2020, di Hyatt Hotel Canberra, Australia*. Diambil dari <https://setkab.go.id/indonesia-australia-roundtable-business-10-februari-2020-di-hyatt-hotel-canberra-australia/>

Sekretariat Kabinet. (2020). *Menlu: Perjanjian Kemitraan Komprehensif Bidang Ekonomi RI-Australia Resmi Berlaku 5 Juli 2020*. Diambil dari <https://setkab.go.id/menlu-perjanjian-kemitraan-komprehensif-bidang-ekonomi-ri-australia-resmi-berlaku-5-juli-2020/>

SGS Economics and Planning Pty Ltd. (2018). *Economic Performance of Australia's Cities and Regions 2017-2018*. Canberra: SGS Economics & Planning.

SSEK. (2020). *Indonesia Omnibus Law - Changes to the Halal Products Law*. Diambil dari <https://www.ssek.com/id/blog/indonesian-omnibus-law-changes-to-the-halal-products-law>

The Jakarta Post News Desk. (2019, 1 Juli). *Indonesia seeks vocational education cooperation with Australia*. Diambil dari Indonesia seeks vocational education cooperation with Australia

Thomas, J. (2019). *IndoMie: Indonesia's favourite noodle represents key opportunity for Australian wheat producers*. Diambil dari AustraliaIndonesia.com: <https://australiaindonesia.com/food/indomie-indonesias-favourite-noodle-represents-key-opportunity-for-australian-wheat-producers/>

Thresher, K. (2020, 5 Juli). *The IA-CEPA, 'Public Morals', and Dispute Settlement*. Diambil dari University of Melbourne: https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-ia-cepa-public-morals-and-dispute-settlement/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-ia-cepa-public-morals-and-dispute-settlement

Trading Economics. (2020). *Australia Private Capital Expenditure*. Diambil dari <https://tradingeconomics.com/australia/private-investment>

UNCTAD. (2019). *Trade and Trade Diversion Effects of United States Tariffs on China*. Geneva: UNCTAD.

UNCTAD. (2020, March). *Investment Trends Monitor: Impact of the COVID-19 Pandemic on Global FDI and GVCs*. Diambil dari https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d3_en.pdf?utm_source=World+Investment+Network+%28WIN%29&utm_campaign=b80b397835-

Universitas Bakrie. (2020). *Advance your career with this unique dual degree offering*. Diambil dari <https://www.bakrie.ac.id/master-of-business-administration-mba>

Universitas Pelita Harapan (n.d.) Student Visa and Permit - New Application. Diambil dari <https://international.uph.edu/services/visa-legal-permits.html>

Ward, K., & Juvyns, V. (2019). *JP Morgan 2019 Investment Outlook: Mid-Year Update*. Diambil dari <https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/per/insights/market-insights/investment-outlook/trade-war-impact-on-global-economy/>

Watanabe, E. (2001). *The Multilateral Trading System: A Development Perspective*. New York: Third World Network.

Wibawa, T. (2020, 4 Januari). *Indonesia and Australia at a 'strategic turning point' as relationship reaches 70-year milestone*. Diambil dari ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2020-01-04/indonesia-australia-reaches-70-years-diplomatic-relations/11825010>

World Trade Organization. (2020, 8 April). *Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy*. Diambil dari https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

World Trade Organization. (2020a). *Regional Trade Agreements Database*. Diambil dari <https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx>

World Trade Organization. (n.d.). *Understanding The WTO: Basic - Principles of the Trading System*. Diambil dari World Trade Organization: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm

Yeoh, O.C. (2016, 26 April). Promoting Malaysia as the region's educationhub of choice. Diambil dari *New Straits Times*: <https://www.nst.com.my/news/2017/03/138781/promoting-malaysia-regions-education-hub-choice>

TENTANG PENULIS

Arianto Patunru adalah Anggota Dewan Direksi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan fellow di Arndt-Corden Department of Economics, Crawford School of Public Policy, Australian National University. Ia pernah menjadi Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI).

Andree Surianta adalah kandidat PhD studi Kebijakan & Program Pemerintahan di Sekolah Kebijakan Publik Crawford, Universitas Nasional Australia. Beliau memiliki gelar sarjana Teknik Industri di Universitas Pelita Harapan dan gelar MBA dari University Toronto, Kanada. Penelitiannya menyelidiki dampak dari kemampuan bahasa dan kebijakan terhadap investasi asing yang masuk ke negara-negara berkembang. Sebelum menempuh Program Doktorat, beliau bekerja di Komisi Perdagangan dan Investasi di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.

Pingkan Audrine adalah seorang Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies dengan fokus penelitian di bidang Kesejahteraan Masyarakat. Pingkan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum bergabung dengan CIPS, Pingkan memiliki pengalaman bekerja di radio swasta nasional, kantor internasional di lembaga pendidikan tinggi dan Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung





